

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2004

### Purnomo: Kontrol Mekanisme Pasar Adalah Harga

JAKARTA — Menteri Energi Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgianto mengatakan, harga bahan bakar gas (BBG), elpiji, dan juga pelumas diserahkan kepada mekanisme pasar atau telah dileberalisasi.

"Mekanisme pasar ini kontrolnya adalah harga di samping juga kualitas," kata Purnomo menanggapi kenaikan harga BBG dan juga elpiji belakangan ini.

Menurut dia, kontrol dari mekanisme pasar ini harga, sehingga jika harga terlalu tinggi tidak akan laku sebab akan diambil produsen lain.

Purnomo mencontohkan dalam bisnis minyak pelumas, saat ini Pertamina cukup baik dalam menetapkan harga jual sehingga dapat memberi kontrol harga. Efeknya Pertamina mampu menguasai pasar hingga 60 persen lebih. "Tapi begitu dia naikkan harga pelumas terus, pangsa pasarnya pasti jatuh."

Akibat liberalisasi BBG, elpiji, dan pelumas ini Pertamina, kata Purnomo, memang dipersilakan untuk melakukan keputusan yang disesuaikan dengan keadaan Pertamina. "Kenaikan harga tersebut sebagai akibat dari Pertamina yang selama ini rugi terus," kata dia. ● muhamad fasabeni

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	HALAMAN : 10
TAHUN 2004	

■ Minyak Dunia

## OPEC Terus Pantau Keseimbangan Pasok dan Permintaan Minyak Dunia

Jakarta, NERACA

Pjs Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-negara Pengeksport Minyak (OPEC) Purnomo Yusgiantoro menyatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan keseimbangan pasok dan permintaan minyak dunia menyusul rencana pertemuan OPEC pada 10 Desember 2004 di Kairo, Mesir. "Saya sudah minta staf saya untuk terus melakukan pemantauan mengenai perkembangan supply dan demand minyak dunia. Nanti hasilnya akan kita bawa ke Kairo untuk dibahas," ucap Purnomo sambil menunjuk Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Migas DESDM), Iin Arifin Takhyan.

Kepada wartawan sesuai membuka acara Pemaparan Blueprint Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH MIGAS) di Jakarta, kemarin ia menyatakan, dalam perkembangan terakhir, tampaknya OPEC harus bersikap hati-hati. Dari laporan yang ada itu misalnya, ada perbedaan kecenderungan market di Asia dan di luar Asia.

Menurut dia, di Asia tampaknya kebutuhan turun karena beberapa

hari ini banyak libur sehingga mempengaruhi harga. Sementara berdasarkan World Trade Market (WTM) memang ada kenaikan karena adanya persepsi bahwa permintaan ini ke depan cukup tinggi meski di Amerika sendiri di beberapa region setelah dicek tak terlalu dingin. "Musim dinginnya belum dirasakan cukup kuat sehingga permintaan belum begitu kuat," kata Purnomo yang juga Menteri ESDM Indonesia.

Menyinggung mengenai sikap Indonesia dalam pertemuan mendatang, ia menjelaskan sikap Indonesia hingga kini masih mempelajari perkembangan yang ada. "Saya kira masih disusun oleh Dirjen Migas. Saatnya nanti sikap itu pasti kita sampaikan," tegasnya.

Di tempat yang sama Dirjen Migas DESDM Iin Arifin Takhyan mengatakan, Indonesia memang belum menentukan sikap mengingat harga minyak dunia masih cenderung fluktuatif, naik turun. "Dewan komisi ekonomi OPEC sampai kini terus mengkaji supply and demand minyak dunia dan belum mengumumkan hasilnya," katanya.

Beberapa minggu belakangan, tutur Iin, harga terus terkoreksi ke bawah hingga ke angka US\$ 36

per barel. Namun perkembangan terakhir kembali naik ke kisaran US\$ 38 per barel. "Makanya kita pantau terus, terutama mencermati faktor-faktor fundamental yang memberi pengaruh besar," katanya.

Sebelumnya, Purnomo menyatakan optimismenya bahwa harga minyak mentah pada pertengahan 2005 akan melemah. Hanya saja bakal berada pada angka berapa kisarannya, ia belum mengungkapkan angkanya. "Second quarter 2005, siklus harga diperkirakan bergerak turun. Beberapa faktor akan mendukung ke arah itu, di antaranya kemungkinan normalisasi Irak pasca Pemilu nanti."

Menurut Purnomo, prediksi mengenai harga minyak akan dibahas dalam pertemuan OPEC di Kairo, Mesir pada tanggal 10 Desember mendatang. Disebutkannya, sejumlah faktor yang diharapkan bisa menurunkan harga karena pada saat ini ternyata musim dingin tidak sedingin yang diperkirakan sehingga tingkat konsumsi minyak tidak sebesar yang dibayangkan sebelumnya.

Di sisi lain, setelah terpilihnya Presiden Bush juga ternyata ditanggapi positif pasar sehingga harga minyak juga bergerak turun

dibawah US\$ 45 per barel.

Satu hal lagi tutur Purnomo, pemilihan umum (pemilu) di Irak yang akan berlangsung 30 Januari 2005 diharapkan bisa menciptakan stabilitas keamanan negara tersebut sehingga nantinya aktivitas produksi ladang-ladang minyak di negara tersebut tidak terganggu. "Bila stabilitas keamanan di Irak terjamin tentunya produksi minyak dari negara itu bisa menambah pasokan dalam jumlah besar ke pasar. Pengaruh terhadap pasar tentu pasti ada," katanya.

Konkretnya lanjut Purnomo, jika pasok dari Irak lancar maka pasokan di pasar lebih terjamin dan tentunya ini berdampak positif untuk bisa menekan harga minyak di pasar internasional. "Sementara itu, dampak harga minyak di pasar internasional terhadap harga BBM di dalam negeri tidak akan terjadi pada tahun 2004, karena harga BBM sudah ditetapkan tidak naik".

Namun, ia menambahkan, untuk 2005 belum bisa dipastikan karena masih akan dibicarakan lagi sehingga sampai saat ini belum ada keputusan untuk itu. "Soal rencana kenaikan BBM tahun depan, masih terus dikaji sampai saat ini, dan yang pasti belum ada keputusan apa-apa," katanya. (31)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 INVESTOR IND.

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT **NOV** DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 **30** 31  
HALAMAN: 14 TAHUN 2004

**Produksi Minyak OPEC Juli-September —**

Rata-rata produksi OPEC (di luar Irak) pada bulan Agustus dan September 2004 mencapai 27,9 juta barrel per hari (bph) atau 1,9 juta bph di atas kuota sebesar 26,0 juta bph. Produksi ini masih di atas kuota produksi baru yang diberlakukan OPEC mulai 1 November 2004 sebesar 27 juta bph. Sesuai data Departemen ESDM, Senin (29/11), tingginya produksi minyak OPEC, yang umumnya berasal dari produksi negara OPEC di Timur Tengah, merupakan bagian dari upaya untuk menstabilkan harga minyak mentah dunia. Meskipun demikian, harga minyak masih bertahan pada level jauh di atas harga keranjang OPEC akibat kompleksnya parameter yang turut memengaruhi harga minyak di pasar internasional. Faktor yang bersifat nonfundamental dan sensitif terhadap pergerakan harga minyak, antara lain perkembangan geopolitik khususnya yang terjadi pada negara produsen utama minyak mentah dunia seperti di Arab Saudi, Irak, dan Venezuela. (BOY)

13

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> UMUM	
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 4 <span style="float: right;">TAHUN 2004</span>	

**Biodiesel berpotensi substitusi solar**

MEDAN (Bisnis): Penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar potensial mensubstitusi sekitar 20% kebutuhan solar secara nasional.

Hal ini dikemukakan Kepala Bidang Penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Darnoko, sebelum pelepasan *road test* bahan bakar diesel rute Medan-Jakarta, dari halaman Dinas Perkebunan Sumatera Utara (Disbun Sumut), Medan, kemarin.

Dengan memperhitungkan kebutuhan solar nasional saat ini yang mencapai sekitar 23 juta ton per tahun, jelasnya, kombinasi biodiesel dan solar dengan perbandingan 20:80 (B-20), dapat mengurangi kebutuhan solar sebanyak 4,6 juta ton per tahun. "Jumlah ini setidaknya mampu mengurangi impor solar yang mencapai 7,2 juta ton per tahun," tutur Darnoko.

Dia menjelaskan berdasarkan penelitian, pencampuran biodiesel dan solar dengan perbandingan 20:80 menghasilkan produk bahan bakar tanpa mengubah sifat fisik secara nyata. Penggunaan pada perbandingan 20:80, jelasnya telah diterapkan di Amerika Serikat dan dikenal dengan istilah B-20.

Darnoko menerangkan 2,3 juta ton biodiesel setara dengan 2.415 ton minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) yang merupakan produksi dari sekitar 700.000 hektare kebun kelapa sawit.

"Jadi pasar produk perkebunan kelapa sawit sangat besar. Selain keuntungan lain yang diperoleh dari bahan bakar biodiesel," jelasnya. (k16)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
HALAMAN : 3 TAHUN 2004

## Realisasi Defisit Anggaran Rp 24,9 Triliun Harga BBM Dinaikkan Dalam Waktu Dekat

Jakarta, Sinar Harapan

Sampai dengan 23 November 2004, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 316,09 triliun atau 78,3 persen dari sasaran, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp 341,08 triliun atau 79,3 persen dari sasaran.

"Dengan demikian, sampai 23 November 2004 tersebut, realisasi defisit anggaran telah mencapai Rp 24,9 triliun atau 1,26 persen dari produk domestik bruto (PDB)," ujar Menteri Keuangan Jusuf Anwar dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin pagi.

Menteri Keuangan melaksanakan pelaksanaan APBN Perubahan 2004 (APBNP 2004) masih tetap aman, meski tidak dapat dihindari adanya kecenderungan meningkatnya defisit anggaran dari perkiraan semula sebesar 1,3 persen terhadap PDB menjadi antara 1,4 sampai 1,5 persen terhadap PDB.

Jusuf melanjutkan semua asumsi dasar APBN sampai akhir tahun, diperkirakan masih tetap sesuai sasaran, kecuali harga minyak yang diperkirakan akan lebih tinggi mencapai rata-rata US\$ 37,63 per barel.

"Dengan perkembangan harga minyak mentah yang tidak terkendali tersebut, defisit APBNP 2004 diperkirakan akan membengkak disebabkan adanya pembengkakan beban subsidi BBM sebagai akibat naiknya harga minyak mentah impor dan produk bahan

bakar impor di pasaran internasional, yang tidak sebanding dengan tambahan penerimaan migas akibat kenaikan kenaikan harga minyak mentah Indonesia," ujar Jusuf.

### APBN 2005

Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Anwar juga mengatakan pemerintah akan melakukan langkah-langkah pengkajian ulang terhadap berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang dipakai sebagai dasar perhitungan APBN 2005, termasuk besaran APBN secara keseluruhan.

Langkah-langkah tersebut di antaranya memperlonggar defisit APBN 2005 dengan *downward trend* menjadi 1 persen dari PDB, dari target semula sebesar 0,8 persen dari PDB.

Pelonggaran defisit tersebut dilakukan melalui upaya optimalisasi penerimaan perpajakan dan bukan pajak, penajaman prioritas dan efektivitas alokasi belanja negara, serta pengurangan subsidi BBM melalui penyesuaian harga BBM di dalam negeri.

Jusuf Anwar menegaskan penyesuaian harga BBM perlu dilakukan dalam waktu dekat

karena beban subsidi membengkak sehingga struktur APBN menjadi tidak sehat.

Alasan lain adalah pemberian subsidi yang dilakukan selama ini tidak tepat sasaran, disparitas harga BBM dalam negeri yang disubsidi dengan harga internasional yang tinggi memicu maraknya praktik praktik penyelundupan dan pengoplosan BBM.

"Harga BBM dalam negeri yang murah akibat subsidi juga tidak mendorong upaya penggunaan dan pengembangan energi alternatif seperti batu bara dan panas bumi," kata dia.

Untuk memperkecil dampak kenaikan harga BBM tersebut, lanjut Jusuf, pemerintah akan melakukan minimalisasi efeknya melalui beberapa program diantaranya menyalurkan dana kompensasi kenaikan BBM untuk rakyat kurang mampu, pembangunan infrastruktur untuk mengurangi pengangguran, menghilangkan hambatan birokrasi dan menghilangkan hambatan kelancaran distribusi arus barang dan jasa.

"Dana kompensasi untuk rakyat kurang mampu tersebut, disalurkan melalui program-program seperti beasiswa pendidikan, program kesehatan, melalui biaya perawatan gratis di rumah sakit kelas tiga dan puskesmas gratis bagi penduduk miskin, program padat karya, program beras untuk masyarakat miskin, dan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan," kata Jusuf. (yat)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
HALAMAN: 14 TAHUN 2004

**Harga Minyak Dunia Bertahan** — Harga minyak dunia hari Senin (29/11) di pasar Asia relatif bertahan di posisi sekitar 49 dollar AS per barrel. Minyak *light sweet* untuk penyerahan bulan Januari diperdagangkan pada 49,19 dollar AS per barrel, turun tipis dari 49,44 dollar AS pada penutupan di New York hari Rabu lalu. Pasar AS libur panjang berkenaan dengan *Thanksgiving holiday*. Pasar minyak dunia sejauh ini tetap menunggu perkembangan dari persediaan bahan bakar minyak di AS. Pekan lalu harga minyak meningkat tajam karena persediaan BBM AS naik 1 juta barrel menjadi 115,6 juta, tetapi minyak pemanas turun membuat harga naik berkenaan permintaan yang biasanya tinggi pada musim dingin di belahan utara. Harga minyak masih di bawah rekor tertinggi 55 dollar AS akhir bulan Oktober lalu. (AFP/PPG)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT **NOV** DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 **30** 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2004

## Harga Minyak Dunia Fluktuatif

**JAKARTA** — Harga minyak dunia setelah pemilihan Presiden AS masih fluktuatif. Kendati harga telah turun, namun masih terjadi fluktuasi harga terlebih memasuki musim dingin di Eropa.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Iin Arifin Takhyan mengatakan, setelah pemilihan presiden AS harga minyak memang sempat turun dari US\$ 60 per barel menjadi US\$ 49 per barel. Sementara itu untuk harga minyak OPEC saat berada pada kisaran US\$ 38 per barel. "Sebelumnya harga sempat turun hingga US\$ 36 per barel tapi naik lagi menjadi US\$ 38 per barel," ujarnya.

Sementara itu, Presiden OPEC Purnomo Yusgiantoro mengatakan, hingga saat ini belum ada permintaan kuota produksi minyak untuk mengendalikan harga. "Saya masih meminta soal keseimbangan pasokan dan permintaan, kami belum meminta kuota," kata Purnomo.

Dia menambahkan, dalam menentukan kebutuhan minyak memang harus berhati-hati. Sebab dari laporan yang masuk memang ada perbedaan antara pasar Asia dan luar Asia. "Di Asia memang kebutuhan turun karena memang banyak hari libur sehingga mempengaruhi harga," ujarnya. Untuk luar Asia, kata Purnomo permintaan cukup tinggi karena terkait dengan musim. Eropa dan juga Amerika mengalami perubahan musim sehingga akan meningkatkan permintaan minyak. ● muhamad Fasabeni

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 INVESTOR IND.

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2004

## Komisaris Pertamina Bakal Dirombak

JAKARTA — Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu dikabarkan akan duduk dalam jajaran komisaris PT Pertamina (persero).

Sumber *Tempo* menyebutkan, usulan itu diajukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saat ini usulan nama-nama menteri itu sudah berada di meja Menteri Sekretaris Negara untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut dia, ada lima menteri, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie,

Menteri Keuangan Jusuf Anwar, Menteri Negara BUMN Sugi-harto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Poernomo Yusgiantoro, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

Dijelaskan juga, langkah untuk mengganti jajaran komisaris Pertamina sebagai langkah awal sebelum melakukan penggantian jajaran direksi Pertamina. "Setelah komisaris, nantinya giliran direksi yang diganti," ujarnya.

Saat dimintai tanggapannya, Direktur Utama Pertamina Widya Purnama menolak berkomen-

tar dengan alasan sedang mengikuti rapat. "Saya masih di Brunei, sedang ada rapat," katanya.

Komisaris Utama Pertamina Laksamana Sukardi juga mengaku belum mengetahui soal pergantian itu. "Saya belum diberitahukan," ujarnya kepada *Tempo* kemarin.

Hanya, menurut dia, jika benar sejumlah menteri akan mengisi jabatan komisaris Pertamina, diperkirakan akan terjadi benturan kepentingan. "Apalagi ada menteri yang pengusaha."

Laksamana menegaskan, jika semua posisi komisaris Pertami-

na diisi menteri, berarti kebijakan ini kembali lagi seperti zaman diterapkannya Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP). Padahal akan terjadi tumpang tindih peranan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan Pertamina sebagai pelaku kegiatan usaha. "Apa jadinya bila pembuat kebijakan merangkap menjadi aktor," katanya.

Selain Laksamana, Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengaku belum mengetahui bahwa akan ada pergantian itu. "Saya belum tahu," katanya kepada *Tempo*. ● erwin daryanto

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 INVESTOR IND.

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2004

## BP Mempertimbangkan Tambahan Investasi di Papua

JAKARTA, KOMPAS — Perusahaan asal Inggris, BP Plc akan mempertimbangkan keputusan untuk menambah investasi dalam proyek LNG Tangguh, Provinsi Papua. Tambahan investasi itu antara lain untuk menambah pembangunan satu kilang gas alam cair (*liquefied natural gas* atau LNG) yang awalnya hanya direncanakan dua kilang.

Demikian dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Senin (29/11). Purnomo mengemukakan hal itu ketika ditanya hasil pertemuan Chief

Executive BP Plc Jhon Browne dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.

"Jadi, kami dorong untuk menambah pembangunan kilang LNG karena pasar LNG saat ini sedang tumbuh dan berkembang. Apalagi Cile ingin membeli LNG dari Indonesia sebanyak 2-4 juta ton per tahun," ujar Purnomo.

Menurut Purnomo, pada saat itu pihak BP Plc akan mempertimbangkan hal tersebut. Sekarang ini BP Plc masih berkontribusi untuk membangun dua kilang LNG pada tahun 2005.

Cadangan gas yang dimiliki BP Tangguh sebanyak 14 triliun kaki kubik (TCF). Sebenarnya masih banyak sumur yang bisa dikembangkan agar produksinya meningkat menjadi sekitar 28 TCF.

### Perpanjangan kontrak

Sementara itu, mengenai perpanjangan kontrak BP Plc di Blok Tangguh di Papua, Dirjen Migas Iin Arifin Takhyan mengatakan, pemerintah cenderung ingin memperpanjang. Namun, pemerintah menghendaki komposisi bagi hasil dan bonus yang lebih baik.

Saat ini, menurut Iin, negosiasi antara pemerintah dan BP Plc sudah mendekati final. Pembahasan yang tersisa hanya soal angka yang belum diputuskan.

Iin mengatakan, diharapkan perpanjangan kontrak sudah bisa dilakukan secepatnya awal Desember 2004. Perpanjangan tersebut berlaku 20 tahun.

Blok Tangguh terdiri dari tiga lapangan, Wiriagar akan berakhir tahun 2023, Berau tahun 2017, Muturi tahun 2022. Lapangan tersebut yang diinginkan BP agar kontraknya dapat diperpanjang. (BOY)

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 6 TAHUN 2004

## BP Tangguh Diminta Optimalkan Cadangan Gas

**JAKARTA** — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, BP Tangguh agar mengoptimalkan cadangan gas alam cair (LNG).

"Cadangannya kalau tidak salah 14 TCF (triliun *cubic feet*), tapi ada cadangan lain yang bisa dikembangkan hingga 28 TCF," katanya di Jakarta kemarin.

Menurut dia, saat ini permintaan LNG cukup baik sehingga jika ada kecocokan harga, *market* akan terbuka lebar. Dengan kondisi ini, kata Purnomo, sebaiknya BP melihat kemungkinan untuk mengoptimalkan cadangan. "Sehingga nanti jika ada permintaan meningkat di negara-negara lain, pasar itu bisa diakomodasi," ujarnya.

Dia mencontohkan, adanya permintaan LNG dari Chile 2-4 juta ton per tahun adalah peluang pasar baru. Purnomo menambahkan, pemerintah akan segera mengirim tim untuk menegosiasikan masalah harga.

Pihak BP, kata Purnomo, menyambut baik tawaran pemerintah. "Jawabannya mereka akan prioritaskan pada Januari 2005 ini dengan membangun *train* yang menghasilkan 7,5 juta ton gas alam cair, sambil melakukan verifikasi terhadap cadangannya," ujarnya. ● muhamad fasabeni

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 INVESTOR IND.

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
HALAMAN: 6

TAHUN 2004

## BP prioritaskan kontrak LNG

JAKARTA (Bisnis): BP Tangguh tetap memprioritaskan pembangunan dua train gas alam cair (LNG) di lapangan Tangguh untuk kontrak yang sudah ada kendati Pemerintah Indonesia meminta perusahaan itu mengembangkan cadangan gas hingga 28 TCF.

Train berkapasitas 7,5 juta ton itu sepenuhnya untuk menutup tiga kontrak penjualan gas alam cair (*liquefied natural gas*) LNG gas yang telah diteken baru-baru ini. Sementara, penambahan cadangan diperlukan untuk memenuhi permintaan gas dari Negara Cile sekitar empat juta ton per tahun.

"Mereka [BP Tangguh] akan prioritaskan pada Januari 2005 ini untuk membangun 7,5 juta ton [dua] train dulu. Itu dulu, sambil mereka melakukan verifikasi cadangan nanti," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di sela-sela *workshop blueprint* Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta kemarin.

Hal itu, katanya, ditegaskan Lord John Brown, *Chief Executive Officer* (CEO) BP Plc, perusahaan migas Eropa yang mengoperasikan proyek Tangguh melalui BP Tangguh, dalam pertemuan dengan Menteri ESDM di Jakarta pekan lalu.

Menurut Purnomo, BP te-

Kontrak-kontrak pembelian LNG Tangguh		
Pembeli	Volume per tahun	Jangka waktu kontrak
Fujian, Cina	2,6 juta ton	25 tahun mulai 2007
SK-Posco, Korsel	550.000 ton	25 tahun mulai 2005
K-Power Co, Korsel	600.000 ton	20 tahun mulai 2006
Sempra Energy, AS	3,7 juta ton	20 tahun mulai 2008

Sumber: Data Bisnis, diolah

tap diminta mengupayakan pengembangan cadangan gas, sehingga dapat memenuhi permintaan dari negara lain menyusul sinyalemen membaiknya pasar LNG dunia di masa mendatang.

"Cadangannya [terbukti] kan 14 TCF [*trillion cubic feet*], tapi bisa dikembangkan sampai 28 TCF. Supaya kalau nanti ada permintaan dari negara-negara *emerging market*, itu bisa diakomodir."

Pasar LNG baru itu, a.l. Cile yang sudah menandatangani kesepakatan rencana penjualan gas dengan Indonesia. Kesepakatan itu sendiri diteken oleh menteri wakil kedua negara di sela-sela pertemuan pemimpin APEC 2004 di Santiago, Cile, baru-baru ini.

Menteri Ekonomi dan Energi Cile Jorge Rodriguez Grossi membenarkan negaranya sedang mencari tambahan pasokan untuk menjaga persediaan gas mengingat perjanjian kerja sama pasokan gas dengan Argentina akan berakhir pada 2008.

"Sekarang ini kan ada permintaan dari Cile sebanyak

empat juta ton, kenapa *nggak* dilihat kemungkinan ini [untuk melanjutkan pengembangan cadangan gas Tangguh]," sergah Purnomo.

### Perpanjangan kontrak

Di sisi lain, BP diketahui telah meminta perpanjangan kontrak bagi hasil di lapangan Tangguh yang akan habis pada 2017 mengingat kontraktor terkait telah terikat perjanjian penjualan gas hingga 2035.

Pemerintah Indonesia sendiri disinyalir mengisyaratkan pembenahan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan itu sebelum perpanjangan kontrak disetujui.

"Harus ada perbaikan *term and conditions*. Kami bilang, itu harus lebih baik untuk Indonesia, terutama yang kita usahakan itu *first trench petroleum* [FTP]," tegas Menteri ESDM.

Sementara itu, Dirjen Migas pada Departemen ESDM lin Arifin Takhyan mengatakan kemungkinan besar pemerintah akan memperpanjang kontrak Tangguh tersebut. (06)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 INVESTOR IND.

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
HALAMAN : 13 TAHUN 2004

# Liberalisasi Perdagangan BBM Terwujud Tahun 2010

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan liberalisasi dalam perdagangan bahan bakar minyak secara penuh di Indonesia baru dapat terlaksana paling cepat pada tahun 2010 atau mundur dari perkiraan semula tahun 2005. Mundurnya era liberalisasi BBM disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk membeli BBM jika pemerintah sudah melepas harga BBM sesuai pasar internasional.

Demikian diutarakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yugiantoro dalam jumpa pers bersama Dirjen Migas Iin Arifin Takhyan dan Kepala Badan Pengatur Hilir Migas Tubagus Haryono seusai membuka Workshop Blue Print Regulasi Hilir di Jakarta, Senin (29/11). Purnomo mengatakan, saat ini hingga tahun 2010 diperkirakan sebagian kelompok masyarakat masih memiliki daya beli (*purchasing power ability*) yang relatif rendah.

Menurut Purnomo, pemerintah melihat pada tahun 2005 baru bisa melaksanakan apa yang dinamakan semiliberalisasi. Artinya, kebijakan harga untuk beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) tetap diatur oleh pemerintah sesuai kemampuan masyarakat.

"Dari lima jenis BBM yang diatur harganya oleh pemerintah, premium, minyak diesel, minyak bakar, minyak tanah, dan minyak solar, tiga jenis bisa dikembangkan untuk mencapai harga pasar. Tetapi, jenis minyak solar dan minyak tanah harus bertahap dilepas," ujar Purnomo.

Oleh karena itu, Purnomo mengatakan, pada tahun 2010

harga BBM murni akan diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Namun, pemerintah tetap memberikan bantuan khusus sebagai pengganti subsidi bagi bahan bakar tertentu.

Liberalisasi sebenarnya bertujuan untuk menata struktur pasar BBM, menghapus subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, dan mendorong Pertamina agar bisa lebih maju dengan berkompetisi. Selain itu, dengan harga BBM mencapai harga pasar, pemakaian bahan bakar alternatif, seperti batu bara dan gas, bisa lebih banyak.

#### Tugas Pertamina

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengakui, sebenarnya liberalisasi dilakukan pada November 2005, saat penugasan Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM di dalam negeri berakhir. Namun, realisasinya terhambat karena ketidaksiapan masyarakat.

"Banyak faktor yang menyebabkan liberalisasi secara penuh terpaksa ditunda hingga tahun 2010. Oleh karena itu, sebelum liberalisasi dilakukan, maka kami usulkan adanya tahap transisi dan tahap penye-

### PERBANDINGAN HARGA BBM DALAM NEGERI DAN HARGA PASAR

Jenis BBM	Harga Dalam Negeri (Rp/liter)	Harga Pasar (Rp/liter)
Premium	1.810	2.780
Minyak Tanah		
Rumah Tangga	700	2.690
Industri	1.800	2.690
Minyak Solar		
Transportasi	1.650	2.610
Industri	1.650	2.610
Minyak Diesel	1.650	2.570
Minyak Bakar	1.650	2.200

Keterangan: - Semua jenis BBM tidak ada subsidi pada harga pasar  
- Asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP): 35 dollar AS per barrel  
Sumber: Departemen ESDM



imbang," ujar Tubagus.

BPH Migas mematok tahap transisi mulai dari 2001 hingga 2005. Dalam kurun waktu itu, minat investor untuk berniaga BBM di Indonesia masih kurang karena pemerintah masih mengeluarkan subsidi.

Tahap selanjutnya adalah tahap penyeimbangan selama periode 2005-2010. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah mulai mengurangi jumlah sub-

sidi sehingga kesempatan usaha semakin besar. Beberapa jenis bahan bakar sudah mulai masuk ke mekanisme pasar.

Tubagus menambahkan, sementara setelah tahun 2010, Indonesia diperkirakan sudah siap. Hal itu setelah pemerintah melepas harga BBM ke dalam mekanisme pasar. Selain itu, daerah yang akan memiliki infrastruktur niaga BBM juga semakin banyak. (BOY)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 INVESTOR IND.

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
HALAMAN : 6 TAHUN 2004

## Pemegang Saham KBC Serahkan Hak Tagih kepada Pemerintah

**JAKARTA** — Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo mengungkapkan, LSP, salah seorang pemegang saham Karaha Bodas Company, telah menyerahkan hak tagih kepemilikan sahamnya 10 persen kepada pemerintah. "Sehingga dia dibebaskan (dari penjara Cipinang)," katanya di Jakarta kemarin.

LSP dibebaskan dari Cipinang pada Jumat malam pekan lalu setelah membayar tunggakan pajaknya Rp 1,2 miliar (*Koran Tempo*, 29/11). Ia dijebloskan ke penjara Cipinang pada Selasa (23/11). "Dia juga menyerahkan hak tagih saham di KBC US\$ 30 juta," kata Hadi.

Jumlah itu merupakan penerimaan LSP atas klaim Karaha yang memenangkan gugatannya di arbitrase internasional US\$ 299 juta terhadap Pertamina. Total tunggakan pajak KBC sendiri sejak 1998 mencapai US\$ 176 juta plus Rp 12 miliar.

LSP dalam data yang dimiliki *Tempo* ada kemungkinan adalah Loedito S. Poerbowasi, Presiden Direktur PT Sumarah Dayasakti yang memiliki 10 persen saham KBC. Sementara itu, dua pe-tinggi KBC warga negara Amerika Serikat masih diburu pemerin-  
tah.

Pemerintah sudah mengirim surat melalui Kedutaan Besar AS di Jakarta sekaligus menagih sisa tunggakan pajaknya. "Sehing-  
ga sisa tunggakan pajak menjadi tanggungan mereka," ujar Ha-  
di. ● bagja

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
HALAMAN : 6 TAHUN 2004

## Gas Alam Masih Sulit Gantikan Minyak Tanah

JAKARTA — Penggunaan gas alam di kalangan rumah tangga dan pelanggan kecil tampaknya akan sulit menggantikan minyak tanah bersubsidi. Alasannya, harga gas belum dapat menyaingi rendahnya harga minyak tanah.

Saat ini Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) masih menyusun pedoman penetapan harga gas melalui pipa untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Rencananya, pedoman itu akan memuat formula harga sehingga kelak nilainya tidak seragam untuk masing-masing daerah.

"Diperkirakan harga gas alam melalui pipa masih lebih tinggi sekitar Rp 400 dari minyak tanah bersubsidi," kata Direktur Gas Bumi BPH Migas Nafrizal Sukumbang kemarin.

Di samping itu, gas alam masih jauh lebih murah daripada elpiji. Dia memprediksi, konsumen akan menghemat sekitar 30-50 persen jika menggunakan gas alam melalui pipa. Namun, konsumen yang dituju baru terbatas pada perhotelan, restoran, perumahan mewah, maupun rumah susun atau apartemen.

Alasannya, biaya untuk pembangunan infrastruktur gas alam tidak murah. "Jika telah ada jaringan pipa gas dalam kota, biaya pemasangan pipa ke setiap rumah setidaknya membutuhkan Rp 2 juta per rumah," katanya.

Seperti diketahui, minyak tanah menduduki porsi tertinggi penggunaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari pemerintah. Berdasarkan catatan Pertamina, rata-rata konsumsi minyak tanah mencapai 32 ribu kiloliter per hari.

Untuk tahun ini, subsidi membengkak hingga Rp 63 triliun akibat melambungnya harga minyak dunia di atas US\$ 50 per barel. Jumlah subsidi itu dengan memakai asumsi harga rata-rata minyak hingga akhir tahun US\$ 36 per barel. Sebelumnya, subsidi hanya dipatok Rp 14,5 triliun dengan asumsi harga rata-rata minyak US\$ 22 per barel.

Untuk tahun depan, pemerintah mengalokasikan besaran subsidi bahan bakar minyak Rp 19 triliun dengan asumsi harga minyak US\$ 24 per barel. Belakangan, akibat terbatasnya keuangan pemerintah, pembayaran subsidi ke Pertamina menjadi tersendat. Bahkan perusahaan minyak dan gas milik negara itu terpaksa meminjam pada perbankan untuk pengadaan BBM.

Di sisi lain, penjualan produk gas oleh Pertamina ternyata tak kunjung menguntungkan. Perusahaan masih merugi dalam bisnis elpiji, bahkan dalam penjualan bahan bakar gas sehingga harganya naik terus. Padahal harga kedua komoditas itu sudah mengikuti mekanisme pasar. Penyebabnya sama, yakni terbatasnya konsumen, biaya pengadaan yang tinggi, serta harga yang masih terlalu murah.

Direktur Pengolahan dan Niaga Minyak dan Gas Bumi Erie Soedarmo mengakui bahwa mewujudkan kondisi yang ideal, yakni menyuplai gas alam yang murah dan terjangkau bagi rakyat, tidak akan mudah.

Sebab, keuangan pemerintah masih terbatas sehingga belum mampu membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Kalaupun harus menarik investor, umumnya pengusaha meminta agar harga gas alam mengikuti mekanisme pasar.

"Saat ini, mewujudkan kondisi yang ideal itu tidak mungkin. Ibaratnya polemik ayam dan telur, mana yang lebih dulu," kata dia kepada *Tempo*.

Karena itu, penggunaan gas sebagai bahan bakar alternatif lebih diprioritaskan pada industri. Erie mengatakan, mempercepat peran swasta akan lebih melapangkan jalan untuk memperluas jaringan transmisi gas.

● dara meutia uning

24

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2004

## Kenaikan Harga BBG Bebani Pengelola Angkutan Umum

JAKARTA (Media) Keputusan Pertamina menaikkan harga bahan bakar gas (BBG) dinilai memberatkan pengelola angkutan umum yang telah menggunakan BBG. Bahkan, para pengelola angkutan umum akan membatalkan rencana pemakaian BBG pada armadanya.

Demikian dikemukakan oleh Ketua Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Dadan Irawan Sarpingi dan Pengurus Yayasan Lembaga Keuangan Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang dihubungi secara terpisah, kemarin.

Sejak kemarin (29/11) Pertamina memutuskan untuk menaikkan harga BBG dari Rp700 per liter setara premium (LSP) menjadi Rp1.550 per LSP. Kenaikan yang mencapai sekitar 120% itu dikarenakan Pertamina tidak mau menanggung kerugian lebih lanjut akibat harga BBG lama yang tidak ekonomis. Pertamina mengaku mengalami kerugian sekitar Rp25 miliar per tahun dari bisnis BBG.

"Walaupun belum banyak angkutan umum yang menggunakan BBG, tetapi kebijakan ini tetap saja tidak menguntungkan pengelola angkutan umum yang menggunakan BBG, tandas Dadan. "Saya rasa mereka tidak akan menambah armada yang menggunakan BBG, malahan mungkin akan mengubah kembali ke bensin kembali."

Bahkan, bagi perusahaan yang akan menggunakan BBG sebagai bahan bakar tentu akan membatalkan rencananya itu. "Saya dengar perusahaan bis yang akan pakai BBG akan mengurungkan niatnya memasang konverter gas untuk bisa menggunakan BBG," ujarnya.

Alasan Pertamina menaikkan harga BBG untuk menekan kerugian, menurut pengurus YLKI, tidak bisa diterima begitu saja. Sebab, selama ini tidak ada penjelasan dari Pertamina mengenai struktur harga dari BBG. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan kebenaran informasi kerugian yang diberikan oleh Pertamina.

"Jangan-jangan struktur harga mereka yang tidak benar. Jangan dibilang perusahaan merugi bila tidak bisa menjelaskan secara transparan struktur harga yang mereka miliki ketika menjual suatu produk," kata Tulus.

Pemerintah seharusnya bisa mengendalikan Pertamina agar tidak seenaknya menaikkan harga komoditas yang dijualnya dengan seenaknya. "Jangan karena tidak disubsidi maka Pertamina bisa dengan gampang menaikkan harga secara sepihak. Pemerintah mesti turut campur karena bagaimanapun Pertamina masih merupakan perusahaan negara," ujarnya.

Langkah menaikkan harga BBG juga menunjukkan sikap tidak konsisten pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk segera beralih menggunakan sumber energi alternatif. Dengan tidak jelasnya arah kebijakan pemerintah maka para pengguna BBM akan meneruskan pola konsumsi yang sudah dilakukan.

BP Tangguh

Sementara itu di tempat berbeda, Dirjen Migas Iin Arifin Takhyan mengisyaratkan pemerintah akan melakukan perpanjangan pengelolaan Lapangan Tangguh di Papua untuk jangka waktu 20 tahun. "Saat ini negosiasi sedang berlangsung. Tinggal perhitungan bagi hasil dan bonusnya saja. Kita tentu minta yang menguntungkan bagi negara. Pihak KPS keihatannya juga bisa memahami," kata Iin.

Lapangan Tangguh saat ini terdiri dari tiga blok yaitu blok Winagar yang kontraknya akan berakhir 2023, blok Brau yang berakhir 2017 dan blok Mutuari yang berakhir 2022. (Uud/E-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 INVESTOR IND.

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2004



**HARGA BBG NAIK.** Petugas stasiun pengisian bahan bakar gas sedang memeriksa tabung penyimpanan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan, di SPBU Mampang, Jakarta Selatan, kemarin. Pertamina mengumumkan kenaikan harga jual BBG menjadi Rp 1.550 per kilo, terhitung sejak pukul 00.00 WIB kemarin.

26

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 INVESTOR IND.

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 24

TAHUN 2004

Tambal defisit anggaran yang membengkak

# Pencairan utang dipercepat

**JAKARTA (Bisnis):** Pemerintah berupaya mengoptimalkan penarikan komitmen pinjaman Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) guna menambal defisit anggaran yang bengkak akibat lonjakan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerja sama Internasional (Bapekki) Depkeu, mengatakan pemerintah berpeluang mengoptimalkan pencairan pinjaman melalui perbaikan negosiasi dengan kreditor multilateral tersebut.

"[Langkah] itu masuk dalam upaya-upaya mempertahankan defisit APBN [Perubahan] 2004," katanya setelah Rapat Kerja Menteri Keuangan Jusuf Anwar dengan Komisi XI DPR di Jakarta kemarin.

Dalam raker tersebut, anggota Komisi XI Dradjad H. Wibowo mempersoalkan upaya mempercepat pencairan pinjaman luar negeri, "yang dikompensasi dengan persyaratan yang berisiko memberatkan Indonesia."

Dia menyebutkan, peluang menarik pinjaman sampai sekitar Rp6,5 triliun (US\$725 juta) itu dibuka, jika Jakarta bersedia memenuhi persya-

ratan kebijakan tertentu yang mesti diterakan dalam Surat Kebijakan Pembangunan.

"Jika seluruh persiapan dapat dilaksanakan segera, pinjaman senilai US\$300 juta [bagian dari komitmen US\$725 juta] sangat mungkin dicairkan Desember dalam satu kali pencairan," ujar Dradjad.

Padaahal, pinjaman senilai US\$300 juta itu semula akan dicairkan pada 2005. Namun Menkeu, yang mewakili pemerintah dalam raker itu, sama sekali tidak menjawab pertanyaan anggota Komisi XI tersebut.

Baru setelah rapat, Anggito membantah tuduhan Dradjad, dan menjamin persyaratan pencairan pinjaman relatif tidak berbeda dengan perjanjian yang telah ada. Sayangnya, dia tidak merinci perjanjian dimaksud.

Dia menjelaskan, dalam APBN-P 2004, hanya dialokasikan Rp3,2 triliun dalam bentuk pinjaman program (uang kas). "Kemungkinan besar [alokasi itu] bisa dilampau [melalui negosiasi] sehingga upaya membiayai defisit anggaran bisa [terpenuhi]," jelasnya.

Pemerintah telah beberapa kali mengubah target defisit anggaran dari 1,2% produk domestik bruto, lalu dalam perubahan APBN menjadi 1,3%, dan menjelang tutup tahun ini diduga lari ke kisaran 1,4%-1,5% dari PDB, akibat membengkaknya subsidi BBM.

Menurut Menkeu, membengkak-

nya defisit itu akibat lonjakan subsidi BBM menyusul kenaikan harga minyak yang diperkirakan menjadi US\$37,5 per barel, di atas target APBN-P US\$36 per barel.

Dalam APBN 2004, realisasi subsidi BBM hingga 23 Nopember sudah mencapai Rp46 triliun (77,8% dari target Rp59,2 triliun).

## Harga BBM naik

Karena membengkaknya subsidi itu, Menkeu juga memastikan pemerintah akan menaikkan harga BBM awal tahun depan.

Menurut dia, pemangkasan subsidi BBM merupakan salah satu cara paling penting untuk menyetatkan struktur APBN dari beban defisit. Apalagi subsidi BBM selama ini dianggap tidak tepat sasaran dan memicu praktik penyelundupan.

Selain memangkas subsidi, kata menkeu, pemerintah juga akan mengoptimalkan penerimaan perpajakan, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak dan rekening dana investasi serta divestasi bank rekap.

Di sisi pengeluaran, akan dilakukan penghematan belanja negara.

Namun, menurut ekonom dari LPEM FEUI Moh. Ikhsan, pemerintah sebenarnya terlampat dalam me-

27

mutuskan kenaikan harga BBM, sehingga subsidi semakin 'membengkak'.

"Saat ini subsidi BBM sebesar Rp83 triliun sudah lebih dari APBN dan jelas sudah di atas anggaran pembangunan pemerintah, apalagi membuat *cash flow* yang semakin berat," katanya.

Pemerintah, lanjutnya, sebenarnya tidak perlu khawatir dengan gejolak sosial yang akan keras menolak kenaikan harga BBM, selama kebijakan itu dibarengi penjelasan dan transparansi penggunaannya.

Selain itu, lanjutnya, eksekusi negatif kenaikan harga BBM dapat diredam dengan tidak menaikkan ongkos transportasi antarkota maupun dalam kota.

Dia berharap pemerintah tidak hanya berlindung di balik kebijakan populis tetapi di sisi lain justru memberatkan anggaran negara. "Memang kebijakan ini [kenaikan harga BBM] seharusnya masuk dalam program seratus hari pemerintah sehingga arah pemerintahan semakin jelas," katanya. (faa/luz)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 INVESTOR IND.

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
HALAMAN : 6

TAHUN 2004

# Harga BBM ikuti mekanisme pasar 2010

JAKARTA (Bisnis): BPH Migas menargetkan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri dapat diserahkan sepenuhnya dalam mekanisme pasar pada 2010.

Badan tersebut kini menerapkan cetak biru (*blueprint*) regulasi usaha BBM nasional dalam tiga tahap untuk menyiapkan penetapan harga bahan bakar itu sesuai mekanisme pasar.

"Jadi, akan ada tahap transisi, lalu tahap penyeimbangan, Pelan-pelan diliberalisasi dan didorong ke harga pasar. Tahun 2010 nanti, itu tahap pematapan [pasar terbuka]," kata Kepala Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono usai membuka *workshop blueprint* BPH Migas kemarin.

Tahap transisi, jelasnya, dihitung dalam kurun waktu tahun 2001-2005 yang ditargetkan seba-

gai persiapan awal usaha hilir BBM diserahkan ke pasar terbuka. Pengusaha BBM, lanjutnya, masih dilaksanakan oleh PT Pertamina.

Sedangkan tahap penyeimbangan, kata Tubagus, diatur pada 2005-2010 dengan memperluas wilayah usaha jenis BBM tertentu yang sudah dapat menjalankan mekanisme pasar dalam penentuan harga.

"Setelah tahap pematapan [2010] itu, kami harapkan itu sudah mulai mekanisme pasar, kecuali satu mungkin *kerosene* [minyak tanah] untuk masyarakat [kecil]."

## Semiliberalisasi

Di lain pihak, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yugiantoro menuturkan pemerintah tetap mempertimbangkan semiliberalisasi produk BBM untuk dipersiapkan dalam mekanisme pasar.

Menurut dia, penetapan harga BBM sesuai pasar dapat dilakukan untuk jenis tertentu, a.l. minyak bakar, minyak diesel, dan premium.

"Semiliberalisasi itu bisa per produk. Perjalanannya kan bisa *cross section* atau *time series*. Yang semi, bisa duluan. Kalau minyak tanah dan solar, karena subsidiya masih cukup besar, itu akan bertahap."

Dia menegaskan pemerintah tetap dapat mengalokasikan dana bantuan khusus BBM dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat tertentu sebagai pengganti subsidi.

Kendati tidak merinci teknis pemberian dana bantuan itu, menteri mengisyaratkan hal itu tidak akan memberatkan finansial PT Pertamina, sehingga memungkinkan BUMN migas tetap mendapat keuntungan dari kegiatan hulu migas.

"Sistem subsidi ini akan dilakukan lebih baik, sehingga Pertamina tidak lagi seperti dulu yang hanya jadi tukang jahit saja, hanya dapat *fee* pengolahan US\$0,20 per barel."

Terkait permintaan izin permanen oleh sejumlah perusahaan swasta, Purnomo mengatakan hal itu masih akan ditinjau kembali berdasar izin prinsip yang telah dikeluarkan Ditjen Migas pada Departemen ESDM.

Izin permanen itu sendiri diperlukan badan usaha swasta untuk dapat menggarap bisnis distribusi, niaga, dan pengangkutan migas nasional mengingat izin prinsip hanya memiliki masa berlaku satu hingga dua tahun. (06)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2004

## Liberalisasi BBM Baru Diberlakukan pada 2010

JAKARTA (Media): Pemerintah baru akan menerapkan liberalisasi soal bahan bakar minyak (BBM) secara penuh pada 2010. Khusus untuk minyak tanah, pemerintah belum akan melepas subsidi saat liberalisasi secara penuh itu dilaksanakan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengemukakan hal itu usai menghadiri *workshop* mengenai cetak biru Badan Pelaksana Sektor Hilir (BPH) Migas di Jakarta, kemarin.

"Pada 2010, harga BBM murni akan diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Pemerintah hanya akan memberikan bantuan khusus sebagai pengganti subsidi bagi bahan bakar kerosin (minyak tanah)," kata Purnomo.

Menurut Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, semestinya liberalisasi dilakukan pada November 2005. Ini sesuai dengan rencana berakhirnya masa penugasan Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM di dalam negeri berakhir. Namun, karena kondisi masyarakat yang belum siap, liberalisasi

terpaksa diundur lima tahun.

"Banyak faktor yang menyebabkan liberalisasi secara penuh ditunda hingga 2010. Namun sebelum liberalisasi dilakukan akan ada tahap transisi dan tahap penyeimbang. Ini usulan kami," kata Tubagus.

Dia menjelaskan, BPH Migas mematok tahap transisi mulai dari 2001-2005. Dalam masa itu, dilakukan perubahan mendasar regulasi perusahaan di bidang BBM.

Tahap selanjutnya adalah tahap penyeimbangan yaitu dari 2005 hingga 2010. Pada kurun waktu tersebut, pemerintah mulai mengurangi jumlah subsidi sehingga kesempatan usaha makin besar. Pada tahapan itu, beberapa jenis bahan bakar sudah mulai masuk ke mekanisme pasar. Bahan bakar yang akan dilepas ke pasar saat itu adalah premium, minyak bakar, dan minyak diesel.

"Solar dan minyak tanah bertahap. Periode itu disebut semi liberalisasi menuju *market price* secara bertahap," tambah Purnomo.

Dalam tahap pasar terbuka, pemerintah masih dimungkinkan untuk

memberikan bantuan khusus sebagai pengganti subsidi. Dan pemerintah memilih untuk memberikan perlakuan khusus bagi minyak tanah karena masih dibutuhkan oleh rakyat kecil.

Karena nantinya pada tahap terbuka masih ada daerah yang termasuk dalam daerah terpencil maka dapat dilakukan penugasan bagi perusahaan penyalur BBM untuk melakukan tugas penyaluran di daerah itu.

Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Gedung MPR/DPR, kemarin, Menteri Keuangan Jusuf Anwar menjelaskan, realisasi harga minyak sepanjang 2004 diperkirakan mencapai rata-rata US\$37,63 per barel. Sedangkan realisasi subsidi BBM sampai dengan 23 November 2004 sebesar Rp46 triliun, atau 77,8% dari target APBN Perubahan 2004 sebesar Rp59,2 triliun.

Sementara, Kepala Badan Pengkajian Ekonomi dan Kerja Sama Internasional Anggito Abimanyu mengatakan, subsidi BBM 2004 diperkirakan membengkak menjadi sekitar Rp75 triliun, atau 27% lebih tinggi dari target APBN-P 2004. (Uud/Ndy/E-1)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2004

## Liberalisasi BBM Dilakukan Secara Bertahap

Jakarta, NERACA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menegaskan, pemerintah menyiapkan liberalisasi bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap. Proses itu dimulai dengan tahapan transisi pada 2005 sebagai masa semi-liberalisasi dan menuju tahapan pemantapan di tahun 2010 sebagai masa liberalisasi secara menyeluruh.

Kepada wartawan selepas membuka acara pemaparan *blue print* Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, di Jakarta, kemarin, Purnomo mengatakan, pada tahapan masa semi-liberalisasi mungkin saja hanya beberapa produk seperti minyak bakar, minyak diesel, dan premium yang diliberalisasi. Sedangkan untuk minyak tanah dan solar karena harga subsidi cukup besar maka dilakukan bertahap.

"Ini adalah semi-liberalisasi menuju ke harga pasar tapi itu dilakukan secara bertahap. Ke tahap berikutnya, ada usul dari BPH Migas yang akan dibahas dalam *road map* BPH nantinya," kata menteri.

Dalam kaitan itu, rencana ke depan, posisi Pertamina tidak lagi sebagai "tukang jahit" yang hanya memperoleh *fee* dari pemerintah sebesar 20 sen dollar AS untuk setiap barel BBM yang diolah.

"Sebagai perusahaan, Pertamina akan menjual BBM itu sesuai

nilai keekonomiannya, namun jika ada kekurangan, pemerintahlah yang akan menutupi dalam bentuk subsidi. Jadi penjualan itu akan mengarah ke mekanisme pasar. Tapi itu tadi, pelaksanaannya tentu bertahap," katanya.

Sementara itu, di tempat yang sama Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan, BBM jenis tertentu secara perlahan-lahan di liberalisasi. Artinya, didorong ke harga pasar, namun tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Tahapan tersebut, menurut Tubagus, dimulai tahun 2005 dan di tahun 2010 dimulai tahap pemantapan pada mekanisme pasar kecuali untuk minyak tanah bagi rumah tangga.

"Untuk BBM jenis tertentu seperti bensin, minyak tanah, dan solar, perlahan-lahan diliberalisasi ke harga pasar," kata mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Dalam *blue print* BPH Migas disebutkan bahwa tugas penyediaan dan pendistribusian BBM di dalam negeri yang diberikan kepada Pertamina akan berakhir November 2005. Aturan itu diharapkan akan mengubah transaksi BBM dari pasar monopoli ke pasar terbuka. "Namun masuknya pemain baru sulit diwujudkan bila harga BBM belum dapat diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar," katanya.

Purnomo menambahkan, perubahan kondisi dari pasar monopoli bersubsidi menuju mekanisme pasar perlu disiasati melalui pentahapan pembukaan pasar yang dirancang dengan baik agar tidak terjadi gejolak sosial. "Apalagi, BBM merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak sedangkan masyarakat telah terbiasa dengan BBM bersubsidi," katanya.

Seperti diketahui, berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi membawa konsekuensi perubahan besar dalam pola pengusahaan dan konsumsi energi nasional. Pertamina yang selama ini berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971 berperan sebagai regulator dan *player* sekaligus, harus meninggalkan posisinya. Selanjutnya peran regulator diserahkan pada Badan Pelaksana (di sektor hulu) dan Badan Pengatur (di sektor hilir), sedangkan Pertamina murni hanya akan jadi *player* saja, setelah mengubah diri menjadi perusahaan perseroan, dan bermain dari hulu sampai hilir dalam bentuk holding company.

Dalam pola lama berdasarkan UU No. 8/1971, Pertamina punya tugas sosial yang diberikan Pemerintah untuk menyediakan BBM dengan harga yang sama dan stabil di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. (31)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 INVESTOR IND.

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
HALAMAN : 3 TAHUN 2004

■ Pajak

## Dirjen Pajak: Pemegang Saham KBC Sudah Bebas Gijzeling

Jakarta, NERACA

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Hadi Purnomo mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak telah membebaskan pemegang saham PT Kahara Bodas Company (KBC) berinisial LSP, setelah ia membayar tunggakan pajaknya sebesar Rp 1,2 miliar. Pemegang saham KBC ini sempat di-gijzeling awal pekan lalu.

"Dia sudah dilepas. Hak tagih sudah diserahkan kepada kita. Jadi, sudah memenuhi persyaratan untuk dilepas. Dia (LSP) sebagai pemegang saham 10 persen di KBC, maka punya hak tagih Rp 1,2 miliar. Dia sudah membayarkan hak tagih itu pada Kamis, (25/11) lalu," kata Hadi Purnomo di Jakarta, Senin, (29/11).

Dikatakan, Ditjen Pajak saat ini masih mengejar dua petinggi KBC yang berwarganegara AS dan Kanada untuk di-gijzeling. Saat ini keberadaan kedua petinggi KBC tersebut belum dipastikan, apakah masih berada di Indonesia atau sudah pergi ke luar negeri.

Seperti diketahui dari 3 penanggung pajak PT KBC ha-

nya satu yang berhasil disandera di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang. Penyanderaan terhadap LSP, mitra lokal pemegang saham KBC, dilakukan Selasa (23/11), atau sehari lebih lambat dibandingkan rencana semula pada Senin (22/11).

"LSP kita eksekusi jam 15 di LP Cipinang. Dia menempati blok H3 bersama dengan MMG dan JL," kata Djangkung Sudjarwadi, Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut dia, surat perintah penyanderaan sebenarnya telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing (Badora) II, Senin (22/11). Namun eksekusinya baru bisa dilaksanakan Selasa (23/11).

Dua penanggung pajak KBC lainnya, MC dan RDMC, keduanya sudah tidak berada di Jakarta dan diperkirakan telah kembali ke negara masing-masing. MC, Manajer Keuangan KBC, tercatat sebagai warga negara Kanada. Sedangkan RDMC, Direktur

KBC, merupakan warga negara Amerika Serikat.

"Untuk penyidikan terhadap dua ekspatriat ini Dirjen Pajak sudah menerbitkan surat panggilan kepada kedua tersangka langsung ke kantor KBC, dan melalui kedutaan besar masing-masing."

Surat itu, dia menambahkan, berisikan panggilan untuk pemeriksaan sekaligus eksekusi atas tindak pidana perpajakan yang mereka lakukan.

Total tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) KBC sebesar Rp 12 miliar, Perusahaan tersebut diketahui pula melakukan tindak pidana perpajakan lainnya, seperti tidak membayar pajak dari hasil tagihan atas putusan *finance watch* pada Desember 2000 sebesar US\$ 271 juta. Dalam perhitungan DJP, KBC setidaknya memiliki kewajiban membayar pajak termasuk denda dari hasil tagihan itu sebesar US\$ 125 juta.

PT KBC juga memiliki kewajiban membayar pajak sebesar US\$ 21 juta akibat permintaannya menunda pema-

sukan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tahun 1998, yang persetujuannya dikeluarkan oleh DJP pada 31 Maret 1999. Saat itu mereka telah melaporkan adanya penghasilan sebesar US\$ 14 juta. Sesuai pasal 39 UU Ketentuan Umum Perpajakan, setidaknya KBC harus membayar kewajiban pajak dan dendanya yang mencapai US\$ 21 juta di tambah hukuman kurungan 6 tahun.

Dalam kesempatan itu Hadi menjelaskan, tax amnesty baru akan efektif diberlakukan jika Ditjen Pajak diberi keterbukaan akses, baik menyangkut transaksi keuangan maupun nontransaksi keuangan.

Keterbukaan informasi, kata dia, diperlukan agar Ditjen pajak bisa melakukan kontrol. "Jangan sampai kita mengulang kejadian tahun 1984, *tax amnesty* gagal karena tidak ada keterbukaan akses."

Sebelumnya Departemen Keuangan (Depkeu) juga mengusulkan penyusunan RUU *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), yang terpisah dari amandemen UU Perpajakan. (\* / 15)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2004

# Menkeu: Harga BBM Segera Naik

JAKARTA - Pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat ini. Hal itu sejalan dengan rencana mengurangi subsidi BBM yang dianggap semakin membebani APBN.

Hal itu ditegaskan Menteri Keuangan Jusuf Anwar dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (29/11) pagi.

Menurut Menkeu, rencana pengurangan subsidi BBM melalui penyesuaian harga perlu dilakukan dalam waktu dekat. Pertimbangan-

nya, beban subsidi BBM membengkak hingga struktur APBN menjadi tidak sehat. Selain itu, pemberian subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. Disparitas (perbedaan) harga BBM dalam negeri yang disubsidi dengan harga internasional yang tinggi memicu maraknya praktik penyelundupan dan pengoplosan BBM.

## Energi Alternatif

Alasan lainnya yang mendasari rencana pengurangan subsidi BBM, untuk mendorong upaya penggunaan dan pengembangan energi alternatif, seperti batu bara dan panas bumi. Pemberian subsidi BBM selama ini, menurutnya, tidak mendorong terjadinya konservasi energi atau hemat energi.

Oleh karena itu, kata Menkeu, sebagai salah satu program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu dan untuk memantapkan stabilitas ekonomi pemerintah memandang perlu melakukan langkah pengkajian ulang (review) terhadap berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang dipakai sebagai basis perhi-

tungan APBN 2005, kebijakan fiskal, dan besaran APBN secara keseluruhan.

Menurut Menkeu, langkah-langkah review APBN 2005 dibagi dalam dua tahapan. Pertama, peninjauan kembali asumsi dasar 2005 berdasarkan perkembangan terakhir kondisi ekonomi nasional dan global. Kedua, memperlonggar defisit APBN 2005 menjadi 1,0 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dari target semula 0,8 persen dari PDB.

Upaya untuk memperlonggar defisit APBN 2005 dilakukan dengan cara, mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan bukan pajak, penajaman prioritas dan peningkatan efektivitas alokasi belanja negara, serta pengurangan subsidi BBM melalui penyesuaian harga BBM di dalam negeri.

"Pemerintah akan menyalurkan dana kompensasi kenaikan BBM untuk rakyat kurang mampu yang terkena dampaknya dengan merancang program-program yang secara langsung menyentuh dan bisa dirasakan mengurangi beban biaya hidup masyarakat," kata Jusuf Anwar.

Dikemukakan, program yang dirancang itu di antaranya dari sektor kesehatan memberikan biaya perawatan gratis di rumah sakit kelas tiga dan puskesmas gratis bagi penduduk miskin, program beras untuk masyarakat miskin, dan program pemberdayaan masyarakat pesisir atau nelayan.

Dana bagi hasil penghematan subsidi BBM dan pelonggaran defisit itu nantinya juga akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur guna menghilangkan hambatan

birokrasi penyebab ekonomi biaya tinggi yang menghambat kelancaran distribusi arus barang dan jasa.

## Jumlah Defisit

Menkeu juga mengungkapkan, hingga 23 November 2004 realisasi defisit anggaran telah mencapai Rp 24,9 triliun atau 1,26 persen dari PDB. Defisit itu dapat dipenuhi dari re-

alisasi sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari privatisasi, penjualan aset program restrukturisasi perbankan, surat utang negara, pembiayaan luar negeri, serta penggunaan sementara rekening pemerintah di BI.

Kepada anggota Komisi XI, Menkeu juga memastikan bahwa defisit APBN Perubahan (APBN-P) 2004 akan membengkak, dari target 1,3 persen dari PDB menjadi 1,4 persen hingga 1,5 persen. Pembengkakan itu disebabkan bertambahnya beban subsidi BBM sebagai akibat naiknya harga minyak mentah impor dan produk BBM di pasaran internasional, yang tidak sebanding dengan tambahan penerimaan migas akibat kenaikan harga minyak mentah Indonesia.

## Masih Dikaji

Berkaitan dengan rencana kenaikan harga BBM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, sejauh ini pemerintah masih mengkaji rencana itu.

Sebab pemerintah harus melihat dan memperhatikan berbagai aspek dan dampak dari kebijakan kenaikan tersebut.

"Kami masih mengkaji, jadi belum ada keputusan pasti apakah tahun depan atau awal tahun harga BBM akan naik," katanya di Jakarta, Senin pagi.

Mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Gas (BBG) yang mulai diberlakukan Pertamina, Senin (29/11) pukul 00.00 WIB, menjadi Rp 1.500 per kilogram (kg), menurut

Purnomo, hal itu kewenangan Pertamina.

Selain itu usulan kenaikan harga Elpiji (*Liquefied Petroleum Gas/LPG*) juga akan diserahkan kepada Pertamina.

Ditemui secara terpisah, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI), Mohamad Ikhsan, sebelum mengikuti seminar bertajuk "Prospek Ekonomi dan Politik Indonesia tahun 2005", Senin pagi, mengatakan, defisit anggaran 2004 akan meledak jika pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM.

"Defisit akan meledak, meskipun ada beberapa komponen lain yang bisa mempengaruhi," kata Ikhsan.

(L-10/H-13/B-15)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT <b>NOV</b> DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 <b>30</b> 31 HALAMAN : 4	
TAHUN 2004	

## Asumsi Harga Minyak tak Tercapai

JAKARTA — Realisasi asumsi harga minyak mentah yang dipatok sebesar 36 dolar AS per barel dalam APBN Perubahan 2004 diperkirakan tidak bakal terpenuhi. Pemerintah memperkirakan realisasi rata-rata harga minyak ini mencapai 37,63 dolar AS per barel dan akibatnya defisit anggaran pun bertambah menjadi 1,4 persen sampai 1,5 persen.

"Dari perkembangan asumsi dasar APBN, kecuali harga minyak mentah yang diperkirakan akan lebih tinggi, yaitu diperkirakan mencapai rata-rata 37,63 dolar AS per barel, berbagai variabel ekonomi makro lainnya diperkirakan masih tetap sejalan dengan perkiraan yang semula diasumsikan dalam penyusunan APBN-P 2004," ungkap Menteri Keuangan, Jusuf Anwar, ketika rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (29/11).

Sesuai dengan target fiskal APBN-P 2004, asumsi harga minyak mentah semula diperkirakan 36 dolar AS per barel. Sedangkan nilai tukar ditentukan Rp 8.900 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 4,8 persen, dan laju inflasi tujuh persen. Selain itu, suku bunga SBI tiga bulan ditetapkan 7,5 persen dan produksi minyak mentah 1,072 juta barel per hari.

Jusuf mengakui akibat perkembangan harga minyak yang melampaui target ini, maka defisit anggaran mau tidak mau akan bertambah. Semula pemerintah dan DPR sepakat mencapai defisit anggaran 1,3 persen. Ini disebabkan oleh beban subsidi BBM sebagai akibat naiknya harga minyak mentah yang diimpor pemerintah dan produk bahan bakar minyak

impur di pasaran internasional yang tidak sebanding dengan tambahan penerimaan migas," jelasnya.

Menkeu memperkirakan defisit anggaran sampai akhir tahun nanti bertambah menjadi 1,4 persen sampai 1,5 persen. Ia menegaskan kenaikan defisit anggaran ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah. "Namun secara umum pelaksanaan APBN-P 2004 diperkirakan masih tetap aman," ujarnya.

Hingga 23 November 2004, realisasi defisit anggaran telah mencapai Rp 24,994 triliun atau 1,26 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini dihitung dari selisih realisasi pendapatan negara dan hibah yang nilainya Rp 316,094 triliun dengan realisasi belanja negara Rp 341,089 triliun.

"Defisit ini masih dapat dipenuhi dari realisasi sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari privatisasi, penjualan aset, program restrukturisasi perbankan, surat utang negara, pembiayaan luar negeri, dan penggunaan sementara rekening pemerintah di BI," papar Jusuf.

Anggota Komisi XI DPR, Dradjad H. Wibowo, mengungkapkan pemerintah berpotensi menarik dana pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia sebesar 725 juta dolar AS hingga Desember 2004. Pemerintah diminta untuk sungguh-sungguh mematuhi segala persyaratan yang ditetapkan kedua lembaga keuangan internasional itu.

"Bank Dunia sedang mempertimbangkan untuk memproses sebuah pinjaman program senilai 300 juta dolar AS sebagai bagian dari pinjaman dari jumlah pinjaman itu," ucapnya. □

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 88

TAHUN 2004

## Percepat Infrastruktur untuk Mendongkrak Pemakaian Gas Bumi!

Hanan Nugroho,  
PERENCANA SENIOR BIDANG ENERGI BAPPENAS

**W**alaupun Indonesia termasuk termaju di dunia dalam pengembangan LNG (*liquefied natural gas*) untuk ekspor, namun pengembangan industri hilir gas bumi dalam negeri kita sangat terlambat. Gas dimanfaatkan untuk bahan bakar dan bahan baku industri. Kebutuhan menggunakan gas bumi di Tanah Air terus meningkat, datang dari berbagai sektor. Bagaimana mesti memenuhi kebutuhan gas dan mengembangkan industri hilir gas domestik?

### Gas untuk substitusi/diyersifikasi energi

Dalam 2-3 dasawarsa terakhir, konsumsi energi kita tumbuh pesat, sekitar 5-7 persen per tahun. Karena konsumsi per kapita masih rendah dan pembangunan ekonomi terus dilakukan, konsumsi energi kita akan membesar. Ini perlu dipenuhi dari berbagai sumber.

Bahan bakar minyak (BBM) telah larut menjadi andalan konsumsi energi kita. Ketergantungan sangat tinggi pada BBM—yang difasilitasi subsidi—sebetulnya tidak sehat buat negeri yang dikaruniai beraneka sumber energi seperti Indonesia. Apalagi kita punya gas dengan cadangan lebih besar (dan harga lebih murah) daripada minyak bumi.

Sebagai bahan bakar, gas unggul karena kandungan panasnya tinggi dan pembakarannya bersih, ramah lingkungan. Potensi gas untuk menggantikan BBM di berbagai pemakaian sangat menjanjikan.

Di pembangkitan tenaga listrik misalnya, gas menawarkan biaya pembangunan murah dan jadwal lebih cepat dibandingkan alternatif pembangkit lain. Operasinya bersih dan murah, membuat pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) jadi favorit.

Bahan bakar gas (BBG) adalah alternatif substitusi BBM di sektor transportasi. Cocok buat kita yang masih mengandalkan bensin bertimbal (*leaded gasoline*). Substitusi BBG terhadap BBM telah dipraktekkan beberapa kota dunia.

Banyak industri dan *services* (hotel dan sebagainya) akan memilih gas bumi, bila bahan bakar itu disediakan sampai ke tempat mereka. Bagi industri pupuk dan petrokimia, gas bumi adalah bahan baku dan penunjang yang disukai.

Bila dapur-dapur rumah tangga kita telah mendapat gas yang dialirkan melalui pipa, besar kemungkinan gas yang akan dipilih ketimbang minyak tanah dan *liquefied petroleum gas* (LPG).

### Pengembangan infrastruktur gas

Mengapa konsumsi gas nasional tidak berkembang? Kendalanya, infrastruktur yang terlalu sedikit. Pusat-pusat konsumsi energi kita berada di Jawa, sedang lokasi cadangan gas ada di pulau-pulau lain nan jauh. Mengirim gas dari sana dan untuk memakainya di Jawa membutuhkan infrastruktur: pipa-pipa transmisi dan distribusi, kapal LNG/CNG, kilang mini LNG, terminal penerima, stasiun BBG, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur ini gas cukup mahal.

Gas kita dulu (di Bontang, Arun) ditemukan dalam volume raksasa, cocok untuk diproses skala besar sebagai LNG. Namun, permintaan di dalam negeri kala itu sangat kecil. Pembangunan rantai industri LNG dari produksi, pemrosesan, pengapalan dan pembuatan terminal penerima di negara tujuan itu terlalu mahal, tak mungkin kita tanggung. Kebijakan mengekspor seluruh gas dulu bukanlah keputusan keliru.

Kini, permintaan gas di dalam negeri tumbuh pesat. Permintaan utama adalah pembangkit listrik, yang menggunakannya untuk bahan bakar melistriki Jawa. Permintaan dari sektor lain: industri, rumah tangga, dan transportasi juga tumbuh, dan akan meningkat bila semakin banyak gas berada dalam jangkauan mereka. Artinya, infrastruktur gas harus disediakan. Pengalaman banyak negara mengajarkan, begitu infrastrukturnya dibangun, konsumsi gas melompat cepat.

Pembangunan infrastruktur itu sudah dilakukan sebetulnya, meskipun masih dalam skala kecil. Distribusi gas kota ada di Jakarta, Bogor, Medan, dan Surabaya. Pelanggannya masih sedikit. Perusahaan Gas Negara (PGN) sedang membangun pipa transmisi untuk mengirimkan gas Sumatera Selatan ke Jawa Barat. Namun, jumlah yang dialirkan nantinya pun belum cukup untuk menghentikan laju konsumsi BBM kita. Sejumlah gas kita malah dialirkan dengan pipa ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan pembangunan pipa transmisi untuk membawa gas dari Kalimantan ke Jawa—membutuhkan biaya sekitar Rp 15 triliun—dalam rencana untuk diwujudkan.

### Tekad bersama membangun gas

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU No. 22 tahun 2001) membawa spirit baru: memprioritaskan gas untuk konsumsi domestik. Mengikuti UU, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH MIGAS) telah dibentuk dengan tugas mengembangkan industri hilir dan mendongkrak pemakaian gas di dalam negeri. Di sisi hulu, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP MIGAS) menegaskan komitmen untuk menyediakan gas bagi pasar domestik. Dengan unbundling dan kompetisi, pemain di industri hilir gas—selain Pertamina dan PGN kini—akan makin banyak.

Dukungan politik terhadap gas telah diberikan, tapi itu saja belum cukup. Pekerjaan detail mesti dilakukan. Peraturan Pemerintah (PP) Hilir—tuntunan pengembangan industri hilir, termasuk gas—terlalu lambat diterbitkan. *Master plan* pengembangan jaringan transmisi dan distribusi gas nasional belum diumumkan ke masyarakat. Jelas, ini menghambat investasi.

Di samping regulasi, percepatan pembangunan infrastruktur gas membutuhkan faktor lain, misalnya pendanaan. Transmisi dan distribusi gas kita yang sedikit itu dibangun mengandalkan pemerintah dan pinjaman Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), European Investment Bank, dan JBIC-Jepang. Kemampuan pemerintah makin terbatas. Sebentar lagi, pembangunan infrastruktur gas yang semakin banyak tak mungkin mengandalkan pola lama. Keterlibatan masyarakat yang lebih besar dibutuhkan untuk membiayai dan melakukan pembangunan itu. Dibandingkan subsidi BBM, biaya untuk membangun infrastruktur gas itu sesungguhnya tidak mahal.

Pemakaian gas yang makin banyak akan menurunkan ketergantungan pada BBM (mengurangi subsidi BBM), memperbaiki keamanan pasokan energi, dan memberikan kita lingkungan lebih bersih. Percepatan pembangunan infrastruktur gas mempercepat jalan ke situ.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Infrastructure Summit Januari 2005 ini. Sejumlah isu infrastruktur—seperti jalan tol, perumahan, dan kelistrikan—akan dibahas. Semoga pembangunan infrastruktur untuk mendongkrak pemakaian gas bumi di pasar domestik juga diperhatikan. ●